

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Al-Faruq, Asadullah. 2004. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia.
- Angga dan Ridwan Arifin. 2018. *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*, Universitas Kediri; *Diversi Jurnal Hukum* Vol. 4 No.2 Desember.
- Ansori, Lutfil, *Reformasi Penegakan hukum Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, 2017
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Menelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blitar” dalam <https://blitarkab.bps.go.id/indicator/23/43/1/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-blitar.html>, diakses 29/06/2021
- Budijanto, Oki Wahyu, *Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI; *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 16, No. 4 Desember 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Justice Bagi Masyarakat Miskin*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 No. 1 2018.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kusnadi, Didi. 2012 *Bantuan Hukum dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahmudatun, Siti, *Konsep Fiqih Siyasah dalam Pearaturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990*, Millah: *Jurnal Studi Agama*, Vol. XVI, No. 1 Agustus 2016.
- Mth, Asmuni, “*Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12 No. 4, 2014.

- Muntolib, Ahamad dan Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Kabupaten Blora*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 3, 2017.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta; LP3ES.
- Posbakumadin Blitar, “Profil Posbakumadin Bitar” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=w5DZUqMKu0k> 23/11/2020
- Pulungan, J. Suyuthi. 1997 *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Redaksi, “Lewat Psobakumadin, Peradin Berikan Bakum Kepada Masyarakat” <https://bit.ly/2QI5iob> diakses pada 23/11/2020
- Rhode, L. Deborah, *Acces to Justice*, Oxford University Press; New York, 2004.
- Samsu, La, *AL-SULṬAH AL-TASYRI’IYYAH, AL-SULṬAH AL-TANFIZIYYAH, AL-SULṬAH AL-QADĀ’IYYAH*, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah Mustofa. 1982. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2001 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang dan Aris Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung; CV. Mandar Maju.
- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before the Law*, Kemenrisdikti; Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14 No. 3 2020.
- Winarta, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sumber Lain

Alqur’an

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
4. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
8. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2019 S.D 2021
9. Keputusan Menteri Hukum danManusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bantuan hukum terhadap Masyarakat Miskin.